
SERUAN PARA PEMIMPIN AGAMA DI TANAH PAPUA

Kepada Yang Terhormat:

Segenap jajaran pimpinan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Papua,
Segenap jajaran TNI dan Polri di Tanah Papua,
Segenap jajaran TPN/OPM di Tanah Papua, dan
Seluruh masyarakat di Tanah Papua

Damai sejahtera!

Pertama-tama perkenankanlah kami, para pemimpin agama di Tanah Papua, mohon ampun di hadapan Allah Sumber Kehidupan dan mohon maaf kepada segenap masyarakat korban karena senyatanya kami yang dipanggil untuk menjalankan misi kemanusiaan kembali gagal menjalankan tugas mengangkat martabat manusia dan penghargaan terhadap nilai kehidupan. Kami tak mampu mencegah terulangnya penggunaan cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan pendapat ataupun dalam menangani masalah yang berkembang di Tanah Papua yang kita cintai ini. Namun demikian, kami tetap akan memperjuangkan kepentingan masyarakat korban sejauh kemampuan kami.

Penggunaan kekerasan yang makin dianggap biasa telah terjadi di berbagai tempat di Tanah Papua dan betul-betul mengguncangkan nurani kita dan sungguh mendatangkan rasa keprihatinan sekaligus kekhawatiran kami yang mendalam bahwa peristiwa-peristiwa kekerasan masih akan berlanjut. Kami catat sejumlah peristiwa kekerasan yang telah terjadi:

1. **Peristiwa di Desa Wondoboi, Kecamatan Wasior, Kabupaten Manokwari tanggal 13 Juni 2001** dimana terjadi penyerangan dan pembunuhan terhadap 5 (lima) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang penduduk sipil serta perampasan senjata di lokasi CV. Vatika Papuana Perkasa oleh kelompok yang digolongkan oleh pihak Polda Irja sebagai kelompok TPN/OPM. Akibat dari peristiwa tersebut, Polda Irja menjalankan sebuah operasi pengejaran yang ternyata merupakan operasi penyerangan besar-besaran terhadap penduduk sipil karena telah mendatangkan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan terhadap sekurang-kurangnya 16 orang karyawan CV. Vatika Papuana Perkasa, penganiayaan terhadap penduduk, pembunuhan terhadap sekurang-kurangnya 6 orang penduduk, pengungsian internal

- sekurang-kurangnya tiga kampung (Isui, Kabou, dan Kubiari), pembakaran dan perusakan sekurang-kurangnya 51 rumah penduduk di Wasior, Wondama, Wondiboi, Senderawoi, Sanoba, Wombu, dan Isey, penghilangan orang sekurang-kurangnya 7 orang, dan isolasi wilayah Wondama hingga saat ini.
2. **Peristiwa di Desa Nengke, Kecamatan Pantai Timur, Kabupaten Jayapura, tanggal 25 Juni 2001** dimana terjadi penculikan atas diri Hubertus Wresman, oleh kelompok bertopeng dan bersenjata laras panjang yang oleh penduduk setempat diduga sebagai anggota TNI (Kopassus). Kasus ini diadukan kepada Pangdam XVII/ Trikora yang kemudian melakukan investigasi gabungan antara Sinode GKI, Kodam, dan Polda. Ternyata saksi-saksi tidak dapat mengenali pihak yang diduga pelaku sehingga pihak Sinode GKI di Tanah Papua dan Direktur ELSHAM Papua dimintai keterangan oleh Polda Irja dengan tuduhan mencemarkan nama baik Kopassus. Tetapi korban yang hilang belum ditemukan dan fakta sesungguhnya belum diungkapkan hingga saat ini.
 3. **Peristiwa di Serui, Kabupaten Yapen-Waropen, tanggal 28 Agustus 2001** dimana terjadi pertikaian dan baku tembak antara TNI Yonif 611 dengan Brimob Polda Irja yang mengakibatkan dua anggota TNI terbunuh dan beberapa orang lain cedera.
 4. **Peristiwa Kali Maro, Kabupaten Merauke, tanggal 12 September 2001** dimana masyarakat setempat menemukan dua mayat di Kali Maro yang diidentifikasi sebagai Willem Onde dan Yohanes Tumin yang dikenal sebagai pemimpin kelompok TPN/OPM di Merauke. Penemuan mayat ini telah mendatangkan kecurigaan dan kekuatiran masyarakat mengingat tidak ada pengungkapan fakta yang jelas oleh aparat penegak hukum.
 5. **Peristiwa di Desa Ansudu, Kecamatan Pantai Timur Betaf, Kabupaten Jayapura, tanggal 17 September 2001** dimana terjadi penyerangan oleh kelompok TPN/OPM terhadap 6 (enam) orang karyawan PT Salaki yang sedang melakukan survey. Peristiwa itu mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dan 5 (lima) lainnya luka-luka.
 6. **Peristiwa Bonggo, Kabupaten Jayapura, tanggal 23 September 2001** dimana terjadi penyerangan oleh kelompok TPN/OPM terhadap pos TNI Kostrad Yonif 511 di lokasi transmigrasi SP-7 Bonggo (100 KM arah Barat Kabupaten Jayapura). Dalam penyerangan tersebut 2 (dua) orang anggota TNI tewas, sebuah radio SSB dirampas, 4 orang anggota TNI cedera berat, dan beberapa ibu warga transmigrasi sempat disandera, 1 orang anggota TPN/OPM tewas. Akibat peristiwa tersebut, pihak Kodam XVII/Trikora telah melancarkan operasi militer untuk menyerang kelompok TPN/OPM.
 7. **Peristiwa Serui, Kabupaten Yapen-Waropen, tanggal 23 September 2001**, dimana terjadi perusakan kantor DPRD Tk.II Yapen-Waropen oleh ratusan orang akibat peristiwa perompakan dan penganiayaan terhadap penduduk setempat di sebuah kapal motor dalam perjalanan dari Serui ke Dawai.

8. **Peristiwa Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 28 September 2001** dimana terjadi penyerangan terhadap Polsek, Koramil, dan Pos TNI Satgas Yonif 753 oleh kelompok TPN/OPM. Berdasarkan peristiwa tersebut Kodam XVII/ Trikora dan Polda Irija menjalankan operasi gabungan guna membalas serangan dari kelompok TPN/OPM tersebut. Dampak dari operasi gabungan ini belum dapat diperoleh mengingat letak geografis yang amat sulit dan jalur telekomunikasi yang amat terbatas.

Peristiwa-peristiwa tersebut tidak lagi merupakan kekerasan insidental tetapi telah menciptakan lingkaran kekerasan yang seakan-akan terjadi secara sistematis dan terencana sehingga melahirkan tindakan balas-membalas yang tak akan berkesudahan. Dengan demikian lingkaran balas membalas tersebut mengakibatkan:

1. Jatuhnya korban jiwa, korban luka-luka berat dan ringan, di pihak kelompok TPN/ OPM, dan aparat keamanan (TNI dan Polri), tetapi terlebih di pihak masyarakat biasa yang terjepit di antara pihak-pihak yang bertikai dengan kekuatan senjata.
2. Pengungsi Internal yang terdiri dari penduduk sipil yang mencari selamat dengan meninggalkan kampung-kampungnya setelah terjadi pertikaian antara kelompok TPN/OPM dengan TNI/Polri, ataupun akibat operasi-operasi penyerangan yang diarahkan kepada penduduk sipil.
3. Suasana ketakutan yang mendalam dan meluas di kalangan penduduk akibat tidak adanya jaminan perlindungan dari pihak manapun terhadap mereka, akibat adanya isolasi wilayah ataupun pembatasan kebebasan bergerak, dan akibat gerak pengungsian penduduk yang menyebar.
4. Blokade pengungkapan fakta yang menjadikan peristiwa yang sebenarnya tidak dipahami oleh khalayak umum sehingga kepentingan korban tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari pihak pemerintah dan khalayak umum. Lebih jauh dari itu pihak-pihak yang hendak mengangkat masalah seperti kalangan agama-agama (Sinode GKI di Tanah Papua) dan pekerja kemanusiaan justru dituduh melakukan pemutarbalikkan fakta dan pencemaran nama baik.
5. Kerugian materiil yang tidak sedikit dan belum dapat diperincikan yang diderita khususnya oleh penduduk sipil, kelompok TPN/OPM, dan instansi TNI dan Polri.

Kenyataan-kenyataan yang kami catat di atas bukanlah hal-hal baru dan kami, para pemimpin Agama, telah berulang kali menanggapi dalam berbagai pernyataan kami sebelumnya. Namun demikian, berdasarkan panggilan kemanusiaan kami, sekali lagi kami dengan tegas menyerukan :

1. **Penghentian tindak kekerasan** baik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok TPN/OPM maupun oleh jajaran TNI dan Polri karena terbukti mengorbankan masyarakat kampung yang tidak berdosa.

2. Jajaran TNI dan Polri maupun kelompok-kelompok TPN/OPM segera **memajukan jalan perundingan (dialog)** dan sejauh perlu mempergunakan pihak ketiga yang dipercayai oleh kedua belah pihak serta **memakai jalur hukum** untuk menangani konflik.
3. Pembentukan segera **Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia** (KPP HAM) oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar segera melakukan penyelidikan *pro iustitia* guna mengungkapkan kebenaran dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia sehingga terjadi penanganan masalah secara hukum.
4. Pembukaan wilayah-wilayah konflik terhadap intervensi kemanusiaan baik yang dilakukan oleh kalangan LSM maupun oleh kalangan agama-agama untuk menangani korban, memberikan bantuan-bantuan darurat, dan memberikan pendampingan psikologis terhadap keluarga-keluarga korban
5. Penghentian interogasi pihak Polda Irija terhadap Pimpinan Sinode GKI di Tanah Papua dan Direktur ELSHAM Papua atas laporan peristiwa Betaf karena pihak GKI sedang menjalankan misi kemanusiaan dan penegakkan kebenaran
6. Penghentian segala tindakan untuk memperlambat peristiwa-peristiwa kekerasan di atas demi kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan pribadi, ataupun kepentingan kelompok mengingat masyarakat korban tengah mengalami kekerasan secara berganda.
7. Kalangan media massa cetak dan elektronik agar memberitakan fakta-fakta yang terjadi secara lengkap dan semata-mata mengabdikan pada kepentingan masyarakat yang menjadi korban.

Demikianlah seruan kami, para pemimpin agama di Tanah Papua, yang mencoba menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan bersama dengan segala pihak yang berkehendak baik. Semoga segala niat dan langkah kita bersama senantiasa dinaungi oleh Allah Sang Pemilik Kebenaran sejati.

Dikeluarkan di Jayapura
Pada tanggal 5 Oktober 2001

Para pemimpin agama di Tanah Papua,

Pdt. Herman Saud M.Th
Ketua Sinode GKI di Tanah Papua

Pdt. John Gobay S.Th
Ketua Sinode GKII

Mgr. Leo Laba Ladjar OFM
Uskup Jayapura

Pdt. S. Sofyan Yoman BSc.
Sekum Persekutuan Gereja Baptis di Irian Jaya

Bpk. Drs. H. Zubeir D. Hussein
Ketua MUI Irian Jaya

Pdt. Mestian Towolom S.Th
Ketua Sinode GIDI